

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SENIN, 04 MEI 2026

RINGKASAN BERITA HARI INI



Komisi B DPRD Sidarjo Hearing Tarif Progresif Parkir RSUD

Ada Keluhan Warga. Bakal Dikaji Ulang

Sidoarjo, Memorandum. Tarif progresif parkir di RSUD Notojuro Sidoarjo menuai keluhan dari masyarakat. Kebijakan ini dinilai tidak proporsional karena menoreh keluarga miskin. Keluhan masyarakat ini dirispon wakil rakyat Kota Delta dengan menggelar rapat dengan pendapat (hearing).



nyambung dengan masyarakat. Karena alasan tersebut, maka perlu dikaji ulang. Apa betul perlu ini perlu direvisi, harus dikaji ulang," tegasnya.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Sidarjo H. Bambang Pujianto, S.Si, M.M. dalam rapat dengan pendapat (hearing) yang digelar Komisi B DPRD Sidarjo pada Rabu (2/5). Sejumlah pihak diundang dalam agenda yang dihadiri Wakil Ketua Komisi B H. Bambang Pujianto, Wakil Ketua H. Suyarno, S.H., M.H., dan Anggota Komisi B H. Kayan, S.H., dan Wakil Ketua Warih Andono, S.E.

Polisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Klopolepuh, Sukodono ini mengatakan, meski tarif progresif parkir di RSUD sesuai peraturan daerah, pelaksanaan tarif harus tetap dikaji ulang. "Tapi untuk pelayanan publik harus tetap terjangkau. Jangan sampai pelayanan publik seperti rumah sakit, perlu ada kenaikan tarif," ujar Wakil Ketua DPRD Sidarjo H. Bambang Pujianto, S.Si, M.M.

Wakil Ketua DPRD Sidarjo H. Bambang Pujianto, S.Si, M.M. menambahkan, pihaknya membuka kemungkinan untuk dikaji ulang kebijakan tersebut tidak berlaku kepada masyarakat. "Ini menjadi masalah penting DPRD bersama eksekutif untuk mengkaji apakah perlu revisi atau penyesuaian teknis di lapangan. Tujuannya agar rakyat tidak terbebani," ujarnya.

Masih kata Gu Wawan, pendamping perwakilan itu produk yang bagus. Tetapi produk yang bagus itu harus

nyambung dengan masyarakat. Karena alasan tersebut, maka perlu dikaji ulang. Apa betul perlu ini perlu direvisi, harus dikaji ulang," tegasnya.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Sidarjo H. Bambang Pujianto, S.Si, M.M. dalam rapat dengan pendapat (hearing) yang digelar Komisi B DPRD Sidarjo pada Rabu (2/5). Sejumlah pihak diundang dalam agenda yang dihadiri Wakil Ketua Komisi B H. Bambang Pujianto, Wakil Ketua H. Suyarno, S.H., M.H., dan Anggota Komisi B H. Kayan, S.H., dan Wakil Ketua Warih Andono, S.E.

Polisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Klopolepuh, Sukodono ini mengatakan, meski tarif progresif parkir di RSUD sesuai peraturan daerah, pelaksanaan tarif harus tetap dikaji ulang. "Tapi untuk pelayanan publik harus tetap terjangkau. Jangan sampai pelayanan publik seperti rumah sakit, perlu ada kenaikan tarif," ujar Wakil Ketua DPRD Sidarjo H. Bambang Pujianto, S.Si, M.M.

Wakil Ketua DPRD Sidarjo H. Bambang Pujianto, S.Si, M.M. menambahkan, pihaknya membuka kemungkinan untuk dikaji ulang kebijakan tersebut tidak berlaku kepada masyarakat. "Ini menjadi masalah penting DPRD bersama eksekutif untuk mengkaji apakah perlu revisi atau penyesuaian teknis di lapangan. Tujuannya agar rakyat tidak terbebani," ujarnya.

Masih kata Gu Wawan, pendamping perwakilan itu produk yang bagus. Tetapi produk yang bagus itu harus

nyambung dengan masyarakat. Karena alasan tersebut, maka perlu dikaji ulang. Apa betul perlu ini perlu direvisi, harus dikaji ulang," tegasnya.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Sidarjo H. Bambang Pujianto, S.Si, M.M. dalam rapat dengan pendapat (hearing) yang digelar Komisi B DPRD Sidarjo pada Rabu (2/5). Sejumlah pihak diundang dalam agenda yang dihadiri Wakil Ketua Komisi B H. Bambang Pujianto, Wakil Ketua H. Suyarno, S.H., M.H., dan Anggota Komisi B H. Kayan, S.H., dan Wakil Ketua Warih Andono, S.E.

Polisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Klopolepuh, Sukodono ini mengatakan, meski tarif progresif parkir di RSUD sesuai peraturan daerah, pelaksanaan tarif harus tetap dikaji ulang. "Tapi untuk pelayanan publik harus tetap terjangkau. Jangan sampai pelayanan publik seperti rumah sakit, perlu ada kenaikan tarif," ujar Wakil Ketua DPRD Sidarjo H. Bambang Pujianto, S.Si, M.M.

Wakil Ketua DPRD Sidarjo H. Bambang Pujianto, S.Si, M.M. menambahkan, pihaknya membuka kemungkinan untuk dikaji ulang kebijakan tersebut tidak berlaku kepada masyarakat. "Ini menjadi masalah penting DPRD bersama eksekutif untuk mengkaji apakah perlu revisi atau penyesuaian teknis di lapangan. Tujuannya agar rakyat tidak terbebani," ujarnya.

Masih kata Gu Wawan, pendamping perwakilan itu produk yang bagus. Tetapi produk yang bagus itu harus

nyambung dengan masyarakat. Karena alasan tersebut, maka perlu dikaji ulang. Apa betul perlu ini perlu direvisi, harus dikaji ulang," tegasnya.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Sidarjo H. Bambang Pujianto, S.Si, M.M. dalam rapat dengan pendapat (hearing) yang digelar Komisi B DPRD Sidarjo pada Rabu (2/5). Sejumlah pihak diundang dalam agenda yang dihadiri Wakil Ketua Komisi B H. Bambang Pujianto, Wakil Ketua H. Suyarno, S.H., M.H., dan Anggota Komisi B H. Kayan, S.H., dan Wakil Ketua Warih Andono, S.E.

Polisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Klopolepuh, Sukodono ini mengatakan, meski tarif progresif parkir di RSUD sesuai peraturan daerah, pelaksanaan tarif harus tetap dikaji ulang. "Tapi untuk pelayanan publik harus tetap terjangkau. Jangan sampai pelayanan publik seperti rumah sakit, perlu ada kenaikan tarif," ujar Wakil Ketua DPRD Sidarjo H. Bambang Pujianto, S.Si, M.M.

Wakil Ketua DPRD Sidarjo H. Bambang Pujianto, S.Si, M.M. menambahkan, pihaknya membuka kemungkinan untuk dikaji ulang kebijakan tersebut tidak berlaku kepada masyarakat. "Ini menjadi masalah penting DPRD bersama eksekutif untuk mengkaji apakah perlu revisi atau penyesuaian teknis di lapangan. Tujuannya agar rakyat tidak terbebani," ujarnya.

Masih kata Gu Wawan, pendamping perwakilan itu produk yang bagus. Tetapi produk yang bagus itu harus



Bupati Subandi saat membuka event Balap Merpati di Desa Gempolsari Tanggulangin. Foto: diskominfo

Sidoarjo Bakal Gelar Balap Merpati Skala Nasional

Sidoarjo - HARIAN BANGSA. Pemkab Sidoarjo berencana menggelar event Balap Merpati berskala nasional pada tahun 2026. Event Balap Merpati tidak sekedar hiburan, namun membentuk ekosistem ekonomi yang melibatkan peternak hingga pelaku UMKM di Sidoarjo.

Rencana menggelar event Balap Merpati berskala nasional disampaikan Bupati Subandi saat membuka Balap Merpati di area PPLS di Dusun Poglunggung Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin, Jumat (1/5). "Kita akan siapkan kegiatan yang berskala nasional," tandas Subandi. Ia mengapresiasi animo masyarakat yang begitu besar terhadap

kegiatan ini. Menurutnya, hobi balap merpati bukan sekedar hiburan, namun kegiatan yang bersifat positif dan dampaknya dirasakan langsung oleh Masyarakat dan demi kemajuan UMKM dan kesejahteraan peternak lokal, support dari Pemkab Sidoarjo sangat penting.

"Tujuannya agar peternak merpati di Sidoarjo bisa tumbuh dan hobi ini menjadi salah satu daya tarik pariwisata. Jika ekonomi bergerak, UMKM jalan, maka nama Sidoarjo juga akan terangkat di kancah nasional," tambahnya.

Subandi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memperlakukan izin kegiatan selama kondusifitas dijaga. Ia juga memantapkan agar lomba semacam ini tidak disalahgunakan untuk ajang perjudian yang bisa merugikan masyarakat. "Sekali lagi, tidak boleh ada perjudian," tegasnya.

Ketua Persatuan Penggemar Merpati Balap Sprint Indonesia (PPMSI) Pengkaj Sidoarjo, Sutoyo Handiman mengapresiasi dukungan nyata Pemkab Sidoarjo. Apalagi juga berencana mengalokasikan anggaran untuk menggelar event besar, mendukung operasional dan subsidi hadiah pada perlombaan perlombaan rintangan. (sta/ra)

Usai Ricuh, PKL Dilarang Berjualan di Alun-Alun

SIDOARJO - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo melarang pedagang kaki lima (PKL) berjualan di alun-alun. Selain menegakkan peraturan yang sudah ada, peringatan itu disampaikan pasca keributan antara satpol PP dan PKL pada Jumat (1/5) lalu.

Sempat ada perselisihan antara petugas dan PKL. Pedagang yang menolak peraturan bahkan sempat memprovokasi pengunjuk untuk memarahi satpol PP. Meski akhirnya pedagang meminta maaf secara resmi usai diantarkan ke dipolisikan.

Kabid Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (KRTH) DLHK Sidoarjo Vira Murti Krida Kulmi menegaskan bahwa kawasan alun-alun tidak untuk aktivitas komersial. Aturan tersebut merujuk pada surat edaran bupati tentang penggunaan alun-alun sebagai ruang publik.

"Alun-alun untuk ruang terbuka hijau dengan pendekatan sosial edukasi. Jadi, apa yang dilakukan Satpol PP itu sudah sesuai aturan," kata Vira. Meski begitu, adanya keributan jadi bahan evaluasi. Pemkab sedang mengkaji penyediaan zona khusus pedagang. Tujuannya agar tidak terjadi gesekan lagi antara kedua pihak.

Pelaksana Tugas (Pt) Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Sidoarjo R. Novianto Koesno Adi Putro mengatakan, petugas sudah memberikan imbauan secara persuasif. Namun, pedagang tak mengindahkan peringatan. Saat situasi memanas, Satpol PP memilih menarik petugas untuk menghindari bentrokan. (ful/hen)



Proyek PL Pemeliharaan Avour Bunting Disidak Masih Zonk, Kabid dan Kontraktor Bungkam

Sidoarjo, Pejaj Kiri. Seperti diberitakan di harian Pejaj Kiri sebelumnya Proyek Pemeliharaan Avour Bunting di dua (2) lokasi saat di (Sidak) Inspektori Mendidik oleh wartawan dalam bahasa jurnalis investigasi lokasi ternyata masih zonk. Keberadaan proyek Pemeliharaan Avour Bunting (PL) ini berada di lokasi avour Bunting desa Janti Waru (Perum Graha Delta) dan avour Bunting Bungbang yang tertera pada aplikasi jawa Sidoarjo 2025 dengan nilai per item proyek Rp 200.000.000 (dua ratus juta) yang ditunjukkan oleh CV Duta Karika dan CV Quntar Abadi berlatar belakang Perubahan Kabupaten. Kepala desa Janti Muhammad Chusni saat dikonfirmasi wartawan di kantornya tentang keberadaan proyek PL di avour Bunting Janti, justru tidak mengesahkan. Sedangkan Kabid Sumber Daya Air Sidoarjo, Farid, saat dikonfirmasi wartawan, ia bingung tidak menjawab sama sekali, via WhatsApp, Selasa, 28/4/26, bahkan saat wartawan menunjukkan hasil investigasi nya di lokasi avour Bunting proyek ini tetap bungkam. Sedangkan Direktur CV Dues Karika saat dikonfirmasi terkait proyek ini, ia juga tetap muti.

Investigasi keberadaan CV ini ternyata situ yang pumya, ucap pengingat penerbitan proyek. Ia berharap sedikit ketan. SERAMPK (Alumni Masyarakat Perangi Kompi) Silih mengedukasi proyek ini bisa bisa fitit, katanya. (Khol/bersambung)



Jembatan Tarik Kidul yang menghubungkan Desa Tarik Kecamatan Tarik, Sidoarjo, dengan Desa Kwaku, Kecamatan Mojokerto, kian membaik. Pagar pembatas jebol, badan jembatan sempit, serta posisi jembatan yang lebih rendah dari badan jalan membuat warga waswas setiap kali melintas.

TARIK-Kondisi Jembatan Tarik Kidul yang menghubungkan Desa Tarik Kecamatan Tarik, Sidoarjo, dengan Desa Kwaku, Kecamatan Mojokerto, kian membaik. Pagar pembatas jebol, badan jembatan sempit, serta posisi jembatan yang lebih rendah dari badan jalan membuat warga waswas setiap kali melintas.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memantapkan pembangunan ulang jembatan lintas kabupaten tersebut akan dilakukan pada 2027.

Konfirmasi itu disampaikan langsung Bupati Sidoarjo Subandi saat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada Sabtu (2/5).

Ke Halaman 10

Terobosan Baru Serap Aspirasi Rakyat

PKB Sidoarjo Luncurkan Jumat Fraksi Fraksi

Sidoarjo - HARIAN BANGSA. DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo resmi meluncurkan program "Jumat Fraksi PKB" dalam acara sarasehan politik di resto Jie Poek DW, Jumat (1/5). Program ini langkah konkret memperkuat penyerasan aspirasi masyarakat sekaligus menjawab berbagai persoalan daerah.

Program "Jumat Fraksi PKB" inisiatif dari DPP PKB yang diimplementasikan hingga ke tingkat daerah. Momentum peluncuran ini mengesankan peran legislator PKB di DPRD agar lebih responsif, terstruktur dan rutin dalam menyerap aspirasi masyarakat setiap pekan.

Ketua DPC PKB Sidoarjo, Abdillah, Nash menjelaskan, program ini dirancang untuk mengoptimalkan fungsi representasi wakil rakyat. "Ini bukan soal ada atau tidaknya kinerja, tetapi bagaimana kita memperkuat peran agar lebih tajam dalam menyerap aspirasi dan menjawab kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. "Anggota dalam adalah lidaah masyarakat. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, kritik, bahkan keluhan," tegas Nash yang juga Ketua DPRD Sidoarjo ini.

Katanya, legislator harus hadir sebagai penghubung nyata antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. "Anggota dalam adalah lidaah masyarakat. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, kritik, bahkan keluhan," tegas Nash yang juga Ketua DPRD Sidoarjo ini.

TABUH REBANA: Anggota Fraksi PKB DPRD Sidoarjo menaruh rebana tabuh peluncuran program "Jumat Fraksi PKB". Foto: istawarna

sebagai penghubung nyata antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. "Anggota dalam adalah lidaah masyarakat. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, kritik, bahkan keluhan," tegas Nash yang juga Ketua DPRD Sidoarjo ini.



Bupati Subandi saat membuka event Balap Merpati di Desa Gempolsari Tanggulangin.

foto: diskominfo

Sidoarjo Bakal Gelar Balap Merpati Skala Nasional

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Pemkab Sidoarjo berencana menggelar event Balap Merpati berskala nasional pada tahun 2026. Event Balap Merpati tidak sekedar hiburan, namun membentuk ekosistem ekonomi yang melibatkan peternak hingga pelaku UMKM.

Rencana menggelar event Balap Merpati berskala nasional disampaikan Bupati Subandi saat membuka Balap Merpati di area PPLS di Dusun Pologunting Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin, Jumat (1/5). "Kita akan siapkan kegiatan yang berskala nasional," tandas Subandi.

Ia mengapresiasi animo masyarakat yang begitu besar terhadap

kegiatan ini. Menurutnya, hobi balap merpati bukan sekedar hiburan, melainkan ekosistem ekonomi yang melibatkan peternak hingga pelaku UMKM di Sidoarjo.

Ia menekankan, untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan dampaknya dirasakan langsung oleh Masyarakat dan demi kemajuan UMKM dan kesejahteraan peternak lokal, support dari Pemkab Sidoarjo sangat penting.

"Tujuannya agar peternak merpati di Sidoarjo bisa tumbuh dan hobi ini menjadi salah satu daya tarik pariwisata. Jika ekonomi bergerak, UMKM jalan, maka nama Sidoarjo juga akan terangkat di kancah nasional," tambahnya.

Subandi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mempersulit izin kegiatan selama kondusivitas dijaga. Ia juga mewanti-wanti agar lomba semacam ini tidak disalahgunakan untuk ajang perjudian yang bisa memicu konflik. "Sekali lagi, tidak boleh ada perjudian," tegasnya.

Ketua Persatuan Penggemar Merpati Balap Sprint Indonesia (PPMBSI) Penglok Sidoarjo, Sutoyo Handiman mengapresiasi dukungan nyata Pemkab Sidoarjo. Apalagi juga berencana mengalokasikan anggaran untuk menggelar even besar, mendukung operasional dan subsidi hadiah pada perlombaan-perlombaan mendatang. (sta/rus)

Terobosan Baru Serap Aspirasi Rakyat

PKB Sidoarjo Luncurkan Jumat Hari Fraksi

Sidoarjo - HARIAN BANGSA
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo resmi meluncurkan program "Jumat Fraksi PKB" dalam acara sarasehan politik di resto Jie Poek DW, Jumat (1/5). Program ini langkah konkret memperkuat penyerapan aspirasi masyarakat sekaligus menjawab berbagai persoalan daerah.

Program "Jumat Fraksi PKB" inisiatif dari DPP PKB yang diimplementasikan hingga ke tingkat daerah. Momentum peluncuran ini menegaskan peran legislator PKB di DPRD agar lebih responsif, terstruktur, dan rutin dalam menyerap aspirasi masyarakat setiap pekan.

Ketua DPC PKB Sidoarjo Abdullah Nasih menjelaskan, program ini dirancang untuk mengoptimalkan fungsi representasi wakil rakyat. "Ini bukan soal ada atau tidaknya kinerja, tetapi bagaimana kita memperkuat peran agar lebih tajam dalam menyerap aspirasi dan mengawal



TABUH REBANA: Anggota Fraksi PKB DPRD Sidoarjo menabuh rebana tanda peluncuran program "Jumat Fraksi PKB". foto istimewa

pembangunan," tandasnya.

Ia menambahkan, program tersebut jawaban atas berbagai pekerjaan rumah besar di Sidoarjo, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian serius.

Katanya, legislator harus hadir

sebagai penghubung nyata antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. "Anggota dewan adalah lidah masyarakat. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, kritik, bahkan keluhan," tegas Nasih yang juga Ketua DPRD Sidoarjo ini.

Peluncuran program "Jumat Fraksi PKB" ditandai simbolis dengan tabuhan rebana oleh Ketua Fraksi PKB, Dhamroni Chudlori, bersama seluruh anggota Fraksi PKB Sidoarjo. Mulai dari anggota senior seperti Usman dan Ainun Jariyah, hingga anggota termuda, Rizza Ali Faizin dan Ahmad Muzayin.

Dhamroni Chudlori menambahkan, secara formal, fungsi fraksi di DPRD mencakup pengawasan kebijakan, pembahasan regulasi, serta penyerapan aspirasi publik. Program "Jumat Fraksi PKB" akan menjadi penguat sistem kerja yang lebih terjadwal dan terukur.

"Setiap Jumat menjadi momentum resmi untuk menyerap aspirasi. Namun, pada praktiknya, anggota fraksi tetap dapat menerima masukan kapan saja dan di mana saja," tandas Dhamroni yang juga Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo.

Ia menambahkan, aspirasi yang diterima tidak hanya dicatat, tetapi ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan di DPRD sebagai dasar pertimbangan kebijakan. Dalam perspektif regulasi, fungsi tersebut sejalan dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (sta/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Komisi B DPRD Sidoarjo Hearing Tarif Progresif Parkir RSUD

Ada Keluhan Warga, Bakal Dikaji Ulang

Sidoarjo, Memorandum

Tarif progresif parkir di RSUD Noto puro Sidoarjo menuai keluhan dari masyarakat. Kebijakan itu dinilai tidak prorakyat karena mencekik keluarga pasien. Keluhan masyarakat ini direspons wakil rakyat kota Delta dengan menggelar rapat dengar pendapat (*hearing*).

Hearing digelar Komisi B di gedung dewan pada Rabu (29/3). Sejumlah pihak diundang dalam agenda yang dipimpin Wakil Ketua Komisi B H Sullamul Hadi Nurmawan (Gus Wawan).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Kloposepuh, Sukodono itu mengatakan, meski tarif progresif parkir di RSUD sesuai peraturan daerah (perda), pelaksanaannya tetap harus berpihak kepada rakyat. "Tapi untuk pelayanan publik seperti rumah sakit, perlu ada kajian ulang. Jangan sampai masyarakat yang kesulitan justru terbebani," ujar Gus Wawan. Gus Wawan menambahkan, pihaknya membuka kemungkinan revisi perda jika terbukti kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat. "Ini menjadi masukan penting. DPRD bersama eksekutif akan mengkaji apakah perlu revisi Perda atau penyesuaian teknis di lapangan. Tujuannya agar rakyat tidak terbebani," paparnya.

Masih kata Gus Wawan, perda tentang parkir itu produk yang bagus. Tetapi produk perda yang bagus itu harus

nyambung dengan masyarakat. Karena ada keluhan masyarakat, maka perlu dikaji ulang. "Apa betul perda ini perlu direvisi, harus dikaji ulang," tegasnya.

Ketua Komisi B H Bambang Pujiyanto SSoS Msi dikonfirmasi terpisah, juga mengemukakan hal senada. Politisi Partai Gerindra asal Candi itu meminta perda yang mengatur parkir progresif dalam pelaksanaannya tetap prorakyat. Evaluasi harus dilakukan bila fakta di lapangan membebani rakyat. "Pembangunan untuk rakyat. Jangan sampai perda justru menyengsarakan rakyat," ujar politisi yang berangkat dari profesi pengusaha ini.

Pun demikian dengan anggota komisi B dari Partai Demokrat, HM Agil Effendi SE MM. Ia juga menekankan agar dalam pelaksanaannya, perda tetap prorakyat. Kalau dalam praktik di lapangan membebani rakyat, harus dievaluasi. "Jangan lupa, pembangunan itu untuk rakyat," ingat Agil Effendi.

Agil Effendi juga menegaskan, Fraksi Demokrat di komisi B siap mengawal Bupati Sidoarjo dalam transparansi pembangunan di segala bidang.



Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo H Bambang Pujiyanto SSoS, Msi.



Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo H Sullamul Hadi Nurmawan.



Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo HM Agil Effendi SE, MM.

Namun, lanjut dia, tetap harus prorakyat.

Dalam *hearing*, sejumlah pihak menilai penerapan tarif tersebut memang berpotensi memberatkan pasien dan keluarga yang berobat di fasilitas layanan publik. Warga menyapaikan keberatan terhadap sistem tarif parkir per jam yang dinilai tidak mempertimbangkan kondisi pasien. "Mohon dievaluasi kembali tarif parkir per jam di RSUD. Ini fasilitas umum untuk pelayanan kesehatan, bukan tempat komersial," ujar warga Sidoarjo yang diundang dalam *hearing* tersebut.

Menanggapi keluhan tersebut, manajemen RSUD Noto puro menjelaskan, penerapan tarif progresif mengacu pada sejumlah regulasi. Di antaranya PP Nomor 23 Tahun 2005 yang diperbarui menjadi PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan BLUD, PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelo-

laan barang milik daerah, serta Permendagri Nomor 79 Tahun 2018/2019. Selain itu, Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur besaran tarif parkir serta skema progresif.

Meski demikian, manaje-

men RSUD mengakui adanya aspek kemanusiaan yang perlu diperhatikan. Untuk itu, mereka telah menyiapkan sejumlah kebijakan khusus, seperti dispensasi tarif bagi pasien rawat inap, pasien *hemodialisa* (cuci darah), serta kelompok pasien tertentu melalui mekanisme pendataan

dan formulir khusus.

"Kami tetap mempertimbangkan kondisi pasien. Ada pengecualian tarif bagi keluarga pasien rawat inap maupun pasien dengan waktu perawatan lama, seperti *hemodialisa*," jelas perwakilan RSUD yang hadir dalam *hearing*.

RSUD juga mengungkapkan ada penyalahgunaan lahan parkir oleh oknum yang tidak berkepentingan, seperti menitipkan kendaraan sehari-hari. Hal ini dinilai mengganggu ketersediaan lahan parkir bagi pasien.

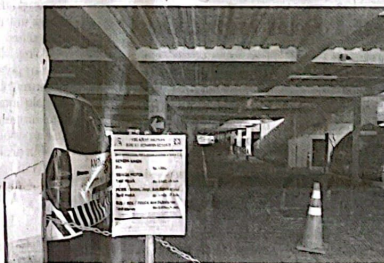
Ketua LSM Java Corruption Watch Sigit, yang juga hadir dalam *hearing* itu, lebih menyoroti denda kehilangan karcis parkir yang dinilai tidak memiliki dasar hukum dalam perda. "Denda kehilangan karcis sebesar Rp 15 ribu untuk motor dan Rp 30 ribu untuk mobil tidak diatur dalam perda. Jika tidak ada

dasar hukum, seharusnya tidak diberlakukan," ujarnya.

Ia menambahkan, fasilitas publik seperti rumah sakit tidak seharusnya dikomersialkan berlebihan, termasuk dalam pengelolaan parkir. "Ini fasilitas milik pemerintah yang dibangun dari pajak rakyat. Jangan sampai pelayanan publik justru menjadi ladang komersial," kritisi.

Hearing tersebut menghasilkan sejumlah catatan penting, di antaranya perlunya evaluasi tarif progresif, transparansi pengelolaan parkir, serta sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban pengguna layanan.

DPRD Sidoarjo berkomitmen untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut agar lebih berkeadilan dan tidak membebani masyarakat, khususnya pasien dan keluarga yang membutuhkan layanan kesehatan. (adv/kri/jok/epe)



Pelayanan parkir RSUD Noto puro yang dikeluhkan masyarakat.



Suasana hearing tarif progresif parkir RSUD Noto puro di gedung dewan.

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Usai Ricuh, PKL Dilarang Berjualan di Alun-Alun

SIDOARJO – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo melarang pedagang kaki lima (PKL) berjualan di alun-alun. Selain menegaskan peraturan yang sudah ada, peringatan itu disampaikan pasca keributan antara satpol PP dan PKL pada Jumat (1/5) lalu.

Sempat ada perselisihan antara petugas dan PKL. Pedagang yang menolak penertiban bahkan sempat memprovokasi pengunjung untuk memarahi satpol PP. Meski akhirnya pedagang

meminta maaf secara resmi usai diancam akan dipolisikan.

Kabid Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (KRTH) DLHK Sidoarjo Vira Murti Krida Laksmi menegaskan bahwa kawasan alun-alun tidak untuk aktivitas komersial. Aturan tersebut merujuk pada surat edaran bupati tentang penggunaan alun-alun sebagai ruang publik. "Alun-alun untuk ruang terbuka hijau dengan pendekatan sosial edukasi. Jadi, apa yang dilakukan Satpol PP itu sudah sesuai aturan," kata Vira.

Meski begitu, adanya ke-

ricuhan jadi bahan evaluasi. Pemkab sedang mengkaji penyediaan zona khusus pedagang. Tujuannya agar tidak terjadi gesekan lagi antara kedua pihak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Sidoarjo R. Novianto Koesno Adi Putro mengatakan, petugas sudah memberikan imbauan secara persuasif. Namun, pedagang tak mengindahkan peringatan. Saat situasi memanas, Satpol PP memilih menarik petugas untuk menghindari bentrokan. (ful/hen)



TOLAK PENERTIBAN: Kawasan alun-alun masih dipakai berjualan hingga kemarin (3/5). DLHK meminta pedagang kaki lima untuk tertib dan mematuhi edaran bupati.



MEMPRIHATINKAN: Bupati Sidoarjo Subandi meninjau kondisi Jembatan Tarik Kidul di Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo.

Jembatan Tarik Kidul Penghubung Sidoarjo-Mojokerto Dibangun Ulang

TARIK-Kondisi Jembatan Tarik Kidul yang menghubungkan Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, dengan Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto, kian memprihatinkan.

Pagar pembatas jebol, badan jembatan sempit, serta posisi jembatan yang lebih rendah dari badan jalan membuat warga waswas setiap kali



melintas. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memastikan pembangunan ulang jembatan lintas kabupaten tersebut akan dilakukan pada 2027.

Kepastian itu disampaikan langsung Bupati Sidoarjo Subandi saat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada Sabtu (2/5).

• Ke Halaman 10

Sambungan

Jembatan Tarik Kidul...

Dalam sidak tersebut, Subandi melihat langsung kondisi fisik jembatan yang dinilai sudah tidak layak digunakan dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

"Karena ini jembatan penghubung antar kabupaten, maka akan segera kita bangun pada 2027. Tentunya harus segera ada perbaikan," ujar

Subandi.

Menurut dia, proses pembangunan ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027. Bahkan, pelaksanaan fisik proyek diharapkan sudah dimulai sekitar Maret atau April. "Nanti sekitar bulan tiga atau bulan empat sudah ada pembangunan di sini," katanya.

Subandi mengungkapkan, pembangunan jembatan tersebut sebenarnya sempat direncanakan lebih awal.

Namun, pelaksanaannya tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran.

"Harusnya tahun kemarin jembatan ini dibangun. Tapi karena ada efisiensi, akhirnya pembangunan ditunda," ungkapnya.

Ia menegaskan, keberadaan Jembatan Tarik Kidul sangat vital karena menjadi akses utama penghubung Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto. Karena itu, pembangunan ulang jembatan dipastikan masuk agenda prioritas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Selain pembangunan ulang, Subandi juga menyoroti perlunya normalisasi di sekitar area jembatan agar fungsi infrastruktur dapat berjalan maksimal.

"Yang kedua juga normalisasi. Kondisinya memang perlu dinormalisasi," tambahnya.

Di lokasi, kerusakan jembatan terli-

hat cukup parah. Pagar pembatas di sisi timur sudah ambruk dan jebol. Sementara di sisi barat, struktur pembatas tampak keropos dan retak. Kondisi tersebut diperparah minimnya fasilitas pengamanan di sekitar jembatan.

Warga setempat, Efendi, mengatakan kerusakan jembatan sudah lama dikeluhkan masyarakat. Warga bahkan sempat memasang tali rafia sebagai penanda darurat agar pengendara lebih berhati-hati saat melintas.

"Sengaja dipasang tali rafia oleh warga, tapi sekarang sudah lepas," ujar pria 36 tahun itu.

Menurut Efendi, tanpa penanda maupun rambu peringatan, risiko kecelakaan di lokasi tersebut cukup tinggi, terutama ketika kendaraan roda empat berpapasan.

"Kalau tidak ada rambu, dikhawa-

irkan pengendara motor atau mobil jatuh ke air. Apalagi kalau dua mobil berpapasan, orang mengira jembatannya lebar, padahal tidak muat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo Muhammad Makhmud menjelaskan, rencana perbaikan jembatan sebelumnya sempat terkendala proses pengadaan.

"Iya, kemarin tahun 2025 gagal lelang dan tidak dapat dilanjutkan pengadaannya karena waktu yang tersisa sudah tidak cukup," katanya.

Sebagai informasi, Jembatan Tarik Kidul setiap hari dilintasi kendaraan roda dua hingga roda empat yang mengandalkan akses penghubung antarwilayah Sidoarjo-Mojokerto tersebut. (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



MACET - Rapat pembahasan rencana pembangunan flyover Gedangan yang digelar di Pemkab Sidoarjo beberapa waktu lalu. Perempatan Gedangan setiap hari macet terutama pagi dan sore hari.

Bangun Flyover Gedangan

► **Proyek Fisik Mulai 2027**

► **Bebaskan 157 Bidang Tanah**

SIDOARJO, SURYA – Kemacetan kronis yang setiap hari menghiasi Perempatan Gedangan mulai menemukan jalan keluar. Pemerintah menargetkan pembangunan Flyover Gedangan dimulai pada 2027. Tahun ini, fokus penuh diarahkan pada pembebasan lahan sebagai fondasi proyek strategis itu. Pemkab Sidoarjo mengalokasikan anggaran sekitar Rp 200

LIPSUS

miliar untuk pengadaan lahan. Sejumlah tahapan telah berjalan, mulai pembentukan tim, appraisal harga tanah, hingga persiapan sosialisasi kepada warga terdampak. "Kita bertugas melakukan pembebasan lahan. Nanti proyek

pembangunannya ditangani oleh pemerintah pusat. Targetnya tahun 2026 ini pembebasan lahan harus sudah rampung," kata Bupati Sidoarjo, Subandi, Sabtu (2/5). Flyover sepanjang 475 meter itu dirancang untuk mengurangi kemacetan parah di Perempatan Gedangan. Pembangunan difokuskan di sisi timur jalan. Total sekitar 157 bidang tanah

milik sekitar 160 warga akan dibebaskan. Bahkan, bangunan Polsek Gedangan juga termasuk yang terdampak proyek. Detail Engineering Design (DED) dari pemerintah pusat telah rampung. Pemkab Sidoarjo kini tinggal menuntaskan tahapan administratif, terutama penetapan lokasi (penlok). "Setelah penlok ditetapkan, kita bakal langsung melakukan

sosialisasi kepada warga terdampak. Tahap berikutnya adalah pembebasan lahan sesuai hasil penilaian Independen," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo, Muhammad Makhmud. Dengan progres yang ada, Pemkab optimistis seluruh pengadaan lahan bisa dituntaskan hingga akhir tahun ini. (tuf)

FLYOVER GEDANGAN :

- Panjang flyover ±475 meter.
- Anggaran pembebasan lahan ±Rp 200 miliar.
- Bidang tanah terdampak ±157 bidang.
- Warga terdampak ±160 orang.
- Lokasi pembangunan sisi timur Perempatan Gedangan.
- Target pembebasan lahan akhir 2026.
- Target konstruksi fisik mulai 2027

Bentuk Timsus Bebaskan Lahan

UNTUK memastikan proses berjalan cepat dan minim sengketa, Pemkab Sidoarjo membentuk tim khusus pembebasan lahan Flyover Gedangan. Tim ini melibatkan berbagai unsur lintas sektor, mulai Badan Pertanahan Nasional (BPN), kejaksaan, kepolisian, hingga perangkat daerah terkait.

Tim tersebut akan menangani seluruh tahapan, termasuk sosialisasi kepada warga, penilaian harga tanah, hingga mekanisme ganti rugi. "Tim pembebasan lahan untuk flyover Gedangan sudah terbentuk beberapa waktu lalu. Mereka yang bertugas membebaskan lahan sebagaimana target yang ditentukan, tuntas pada tahun 2026 ini karena tahun depan mulai dilakukan pembangunan fisik," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo, M Bahrul Amig.

Menurutnya, pembebasan lahan untuk Flyover Gedangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah tahun ini. Tahapan tersebut meliputi sosialisasi kepada warga terdampak, penilaian harga oleh appraisal independen, hingga mekanisme ganti rugi yang adil.

Jumlah warga terdampak proyek flyover tersebut relatif terbatas, yakni sekitar 160 jiwa. Dengan jumlah tersebut, proses pembebasan lahan diharapkan dapat berjalan bertahap dan lancar sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemkab Sidoarjo akan berusaha memastikan penentuan nilai ganti rugi dilakukan secara objektif dengan melibatkan appraisal independen. Langkah ini diambil agar masyarakat mendapatkan nilai kompensasi yang wajar dan



SURYA/M TAUFIK

BUPATI SIDOARJO SUBANDI

transparan.

Amig menyebut, pembangunan Flyover Gedangan merupakan proyek berbagi kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan lahan, sedangkan pembangunan fisik flyover akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Pihaknya berharap seluruh tahapan administrasi dapat segera berjalan sehingga proyek flyover bisa direalisasikan sesuai target dan mampu mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di perempatan Gedangan. (ufl)

Harapan Warga Jangan sampai Molor

PEMBANGUNAN flyover Gedangan sangat diharapkan oleh warga. Utamanya mereka yang setiap hari beraktivitas melintasi jalur utama penghubung Surabaya - Sidoarjo tersebut.

Perempatan itu disebut-sebut paling fenomenal karena menjadi langganan macet hampir setiap hari. Kondisi jalan yang kecil tak mampu lagi menampung banyaknya kendaraan yang melintas. Apalagi saat pagi dan sore hari.

"Sudah bertahun-tahun merasakan macet setiap melintasi di perempatan Gedangan. Tentu kami senang mendengar kabar akan dibangun jembatan layang. Supaya tidak macet lagi," ujar Arifin, warga Gedangan.

Pria yang bekerja di Surabaya itu mencontohkan kondisi Bundaran Aloha. Sebelum dibangun jembatan layang, titik tersebut juga menjadi langganan macet yang luar biasa. Tapi setelah jembatan layang terbangun, sudah tidak pernah lagi macet di sana. Kecuali ketika ada kejadian-kejadian tertentu.

Hal serupa disampaikan Rosyidi, pria yang tinggal di Sukodono dan setiap hari melintasi Perempatan Gedangan

untuk beraktivitas di Surabaya. Dia berharap, pemerintah benar-benar serius menyelesaikan persoalan kemacetan di Gedangan. Jangan sampai, proyek itu molor atau tidak terealisasi.

"Kabarnya sudah proses pembebasan lahan. Semoga benar-benar terealisasi dengan cepat. Supaya jalur tersebut tidak lagi menjadi langganan macet," harapnya.

Beberapa pihak juga terus menyoroti proyek pembangunan jembatan layang tersebut. Termasuk dari kalangan LSM dan sebagainya. Mereka mendesak pemerintah untuk benar-benar serius menjalankan programnya, supaya tidak batal atau molor seperti beberapa proyek besar lainnya.

"Kalau sudah direncanakan, dan uangnya juga sudah dialokasikan di APBD, tim yang bertugas harus bekerja dengan cepat. Jangan sampai ketika awal tahun begini santai-santai, nanti di akhir tahun menjadi kelabakan ketika ada persoalan dalam prosesnya," kata Kasmuin, Direktur Center for Participatory Development (CePad) Indonesia.

Aktivis senior itu mengingatkan demikian karena tahun



SURYA/M TAUFIK

TERDAMPAK - Polsek Gedangan yang di sisi timur Jalan Raya Gedangan ikut terdampak pembebasan lahan untuk flyover gedangan.

kemaria ada beberapa proyek besar di Sidoarjo yang bermasalah dan bahkan gagal. Seperti pembangunan Rumah Sakit di Sedati yang gagal karena ada beberapa masalah dalam proses pengerjaannya, dan beberapa proyek lain yang molor sampai tahun berikutnya.

"Jangan sampai persoalan seperti di Sedati terulang. Atau pekerjaan molor seperti pembangunan alun-alun, Pintu Air Kedungpeluk, dan beberapa lainnya itu terulang. Pembangunan Flyover Gedangan ini sangat ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat," tandasnya.

Kuncinya sekarang ini, adalah pembebasan lahan. Karena itu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ketika targetnya tahun ini selesai, harus benar-benar diselesaikan.

"Kalau soal pembangunan fisik, kami yakin bisa terealisasi sesuai jadwal karena yang mengerjakan adalah pemerintah pusat. Itu sudah terlihat seperti pembangunan Flyover Aloha. Pembebasan lahan ini yang harus dikawal bersama. Jangan sampai molor, karena itu akan berimbas pula pada molornya pekerjaan fisik," ujarnya. (ufi)

Ciptakan Lingkungan Bebas Genangan Air RSUD R.T. Notopuro Bangunan Sanitasi dengan Material U-Ditch

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Pada Dasarnya Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, serta peralatan berbagai jenis alat medis untuk diagnosis, terapi, dan pemantauan pasien, mulai dari alat dasar hingga penunjang intensif, karena Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Oleh karena itu untuk memenuhi prasarana rumah sakit yang bertujuan untuk menjaga sanitasi ramah lingkungan, mencegah genangan air, dan mengendalikan risiko penyakit maka rumah sakit wajib memiliki sistem drainase yang baik dan memenuhi persyaratan teknis seperti halnya di tahun 2026 ini RSUD R.T Notopuro melakukan Pekerjaan Pembangunan Drainase dengan menggunakan material beton Pracetak (U-ditch).

BUPATI SIDOARJO JADI IRUP HARI OTONOMI DAERAH XXX DAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2026



Sidoarjo, Pojok Kiri,- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX dan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Alun-Alun Sidoarjo, Sabtu (2/5/2026).

Tema peringatan Hari Otonomi Daerah XXX kali ini adalah "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita". Sementara itu, tema Hari Pendidikan Nasional 2026 adalah "Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua".

Bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) adalah Bupati Sidoarjo, H. Subandi. Adapun pengatur upacara adalah Dr. Firto Adi, M.Pd., dan kegiatan tersebut dihadiri berbagai pasukan upacara, antara lain 1 unit Korsch Pembak Sidoarjo, 1 pleton Pasukan Pamong Praja, 1 pleton Dinas Perhubungan Sidoarjo,

1 pleton Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, 1 pleton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, 1 pleton Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Sidoarjo, 1 pleton kepala desa/kelak, 1 pleton Linmas, 1 pleton PGRI, 1 pleton purna Paskibraka, serta 7 pleton mahasiswa/pelajar.

Dalam sambutannya, Subandi menyampaikan bahwa peringatan tersebut bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menyampaikan bahwa peringatan tersebut bukan sekadar seremonial tahunan, tetapi momentum refleksi untuk memperkuat komitmen dalam membangun daerah dan menderaskan kehidupan bangsa.

Menurutnya, peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung semangat pen-

gkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan masyarakat telah membuahkan hasil yang membanggakan, di mana Kabupaten Sidoarjo meraih penghargaan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan kategori tertinggi serta peringkat kedua dari 415 kabupaten di Indonesia.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukanlah tujuan akhir. Ia menegaskan bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan karena dihadapkan pada tuntutan pelayanan yang semakin

cepat, transparan, dan berbasis digital, sehingga transformasi birokrasi harus terus didorong agar menjadi adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

Pada momentum Hari Pendidikan Nasional, ia juga menyoroti berbagai tantangan pendidikan, mulai dari kesenjangan kualitas, adaptasi teknologi digital, hingga penguatan karakter dan keajahteraan tenaga pendidik.

Ia menyampaikan bahwa pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan lulusan yang pintar secara akademik, tetapi juga harus melahirkan manusia yang berkarakter, beretika, dan memiliki daya saing tinggi.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mendorong penguatan pendidikan karakter, peningkatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi, serta pemerataan akses pendidikan.

Ia juga menyampaikan bahwa otonomi daerah tanpa kualitas sumber daya manusia tidak akan menghasilkan kemajuan yang berkelanjutan serta mengajak untuk membangun Sidoarjo yang maju, berdaya saing, dan bermartabat.

Pada akhir upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi kepada guru dan siswa berprestasi tingkat nasional dan internasional, di antaranya penghargaan Adiwiyata Mandiri, guru berdedikasi pada SMP PGRI tingkat nasional, medali emas Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) SMP/MTs sederajat tingkat nasional, medali emas Tournament of Champions di Yale University, Amerika Serikat, serta First Place Junior Category Math Action of Earth Award di Filipina tahun 2026. (Khol/ADV)

POJOK KIRI

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



Proyek PL Pemeliharaan Masih Zonk, Kabid da

Sidoarjo, Pojok Kiri,- Seperti diberitakan di harian Pojok Kiri sebelumnya Proyek Pemeliharaan avour Buntung di dua (2) lokasi

proyek PL di avour Buntung Janti, justru tidak mengetahuinya.

Sedangkan Kabid Sumber Daya Air Sidoarjo, Far-



saat di (Sidak) Inspeksi Mendadak oleh wartawan, dalam bahasa jurnalis investigasi lokasi ternyata masih zonk.

Keberadaan proyek Penunjukan Langsung (PL) itu berada di lokasi avour Buntung desa Janti Waru (Perum Graha Delta) dan avour Buntung Bungurasih yang tertera pada aplikasi lypse Sidoarjo 2026 dengan nilai per item proyek Rp 200.000.000 (dua ratus jutaan) yang dimenangkan oleh Cv Duta Kartika dan CV Guntur Abadi beralamatkan Perumahan Kahuripan.

Kepala desa Janti Muhammad Chusen saat dikonfirmasi wartawan di kantornya tentang keberadaan

id saat dikonfirmasi wartawan, ia bungkam tidak menjawab sama sekali, via WhatsApp, Selasa, 28/4/26, bahkan saat wartawan menunjukkan hasil investigasinya di lokasi avour Buntung tidak ada kegiatan proyek, ia pun tetap bungkam. Sementara Direktur CV Duta Kartika saat dikonfirmasi terkait proyek ini, ia juga tutup mulut.

Investigasi keberadaan dua CV itu rupanya satu orang yang punya, ucap penggiat pemerhati proyek, H Abdul. Sedangkan ketua LSM AMPK (Aliansi Masyarakat Perangi Korupsi) Solik menduga proyek itu bisa fiktif, katanya. (Khol/bersambung)



Pengumuman

Nama Nisan Tendi

Jenis Pengadaan

K/L/PO/Instansi

Satuan Kerja

Pago

M/S

Nama Pemenang

CV GUNTUR

ABADI



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemdes Banjarasri Realisaikan Bantuan Keuangan dengan Pembangunan Pavingisasi Jalan Lingkungan untuk Kelancaran Aktifitas Warga

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Untuk memudahkan kegiatan warga dan memperlancar geliat perekonomian masyarakat, Pemerintah Desa (Pemdes) Banjarasri Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, melakukan pavingisasi jalan lingkungan di RT/09-11 anggarannya bersumber dari bantuan keuangan anggota DPRD kabupaten Sidoarjo Tahun 2025.

Kepala Desa Banjarasri Muclison melalui Kasie Kesra M. Nasrudin mengatakan, jika proyek pavingisasi jalan lingkungan, tersebut untuk menunjang kelancaran

aktifitas dan roda perekonomian warganya.

Proyek pavingisasi sendiri telah dikerjakan dan selesai Pebruari 2026 lalu, dengan anggaran Rp. 200 juta, yang anggarannya bersumber dari Bantuan Keuangan (BK)

Dijelaskan Nasrudin, jika proyek pengerjaan paving jalan pemukiman tersebut diharapkan dapat memperlancar aktifitas warga. Bantuan keuangan tersebut sudah masuk rekening desa tahun 2025. Penyerapannya di mulai tahun 2026 dikarenakan untuk membangun jalan di lingkungan RT/10 sampai dengan RT/ 11 membutuh-

kan waktu pekerjaan sekitar sebulan lebih sehingga bantuan keuangan kita Silpakan untuk digunakan tahun 2026 dan dibuatkan rencana anggaran biaya (RAB) juga sudah sesuai dengan standard paving yang dipasang, ujar Nasrudin.

Sementara itu, Jayadi salah satu warga RT/10 mengatakan, warga sangat terbantu dengan adanya proyek pavingisasi di lingkungan dusunnya. Dengan kondisi jalan yang baik, aktifitas warga jadi lancar dan memudahkan kegiatan ekonomi warga. "Kalau sebelum dipaving jalannya rusak dan becek mas kalau hujan

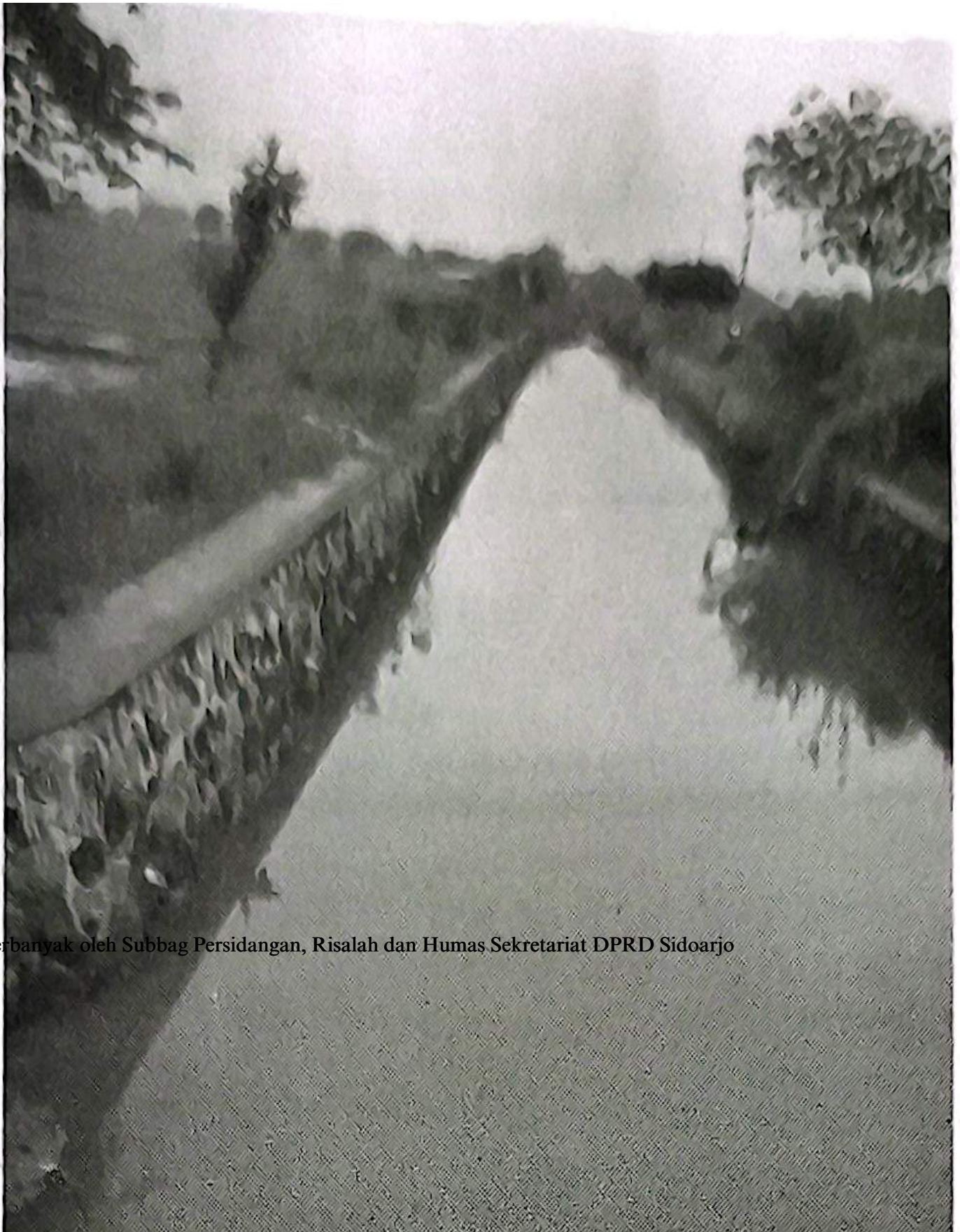


M. Nasrudin, Kasie Kesra Desa Banjarasri.

apalagi didesa kami ini sudah menjadi langganan banjir setiap tahun dikala musim hujan. Sekarang jalannya sudah bagus dan mulus mas.

Kami sangat berterima kasih kepada Pemdes Banjarasri yang telah merealisasikan pembangunan jalan paving sebut Jayadi." (Lie/Khol)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Jepretan wartawan saat Investigasi lokasi proyek Irigasi Kedondong , terlihat Zonk tidak ada kegiatan proyek Peningkakatan Irigasi PL.

Proyek PL Peningkatan Saluran Irigasi Kedondong Disidak Masih Zonk

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Proyek Peningkatan irigasi Kedondong di (Sidak) Inspeksi Mendadak oleh wartawan, dalam bahasa jurnalis investigasi lokasi ternyata masih zonk. Keberadaan proyek Penunjukan Langsung (PL) itu berada dilokasi irigasi Desa Kedondong Tulangan yang tertera pada aplikasi Ipse Sidoarjo 2026 dengan nilai per item proyek Rp 300.000.000 (tiga ratus juta) an yang dimenangkan oleh Cv Tri Sua beralamatkan Ketimbang Wonoayu.

Kepala desa Kedondong saat dikonfirmasi wartawan di kantornya tentang keberadaan proyek PL di Peningkatan Irigasi justru tidak mengetahuinya. Sedangkan Kabid Jembatan Jalan Sidoarjo, Prayit saat dikonfirmasi wartawan, Kamis 30/4/26 ia katakan mulai sekarang proyek PL Peningkatan Irigasi Kedondong dikerjakan, katanya.

Sayang ketika hasil investigasi wartawan di lokasi tidak ada kegiatan proyek dengan menunjukkan foto lokasinya, ia pun terdiam seribu bahasa tanpa jawaban.

Sementara Direktur CV Tri Sula, Fauzan saat dikonfirmasi terkait proyek ini, via WhatsApp, Kamis, 30/4/26 ia tutup mulut. Investigasi keberadaan CV Tri Sula itu rupanya sering mendapatkan proyek PL dari Dinas PUBMSDA Sidoarjo ucap penggiat pemerhati proyek, H Abdul.

Sedangkan Solik ketua LSM AMPK menduga proyek itu kalau sampai sekarang belum dikerjakan bisa bisa fiktif, ucapnya. **(Khol/bersambung)**